

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

(Studi Penelitian di SMA negeri 1 lubuk Kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar)

Oleh: Suzanni

ABSTRAK

MBS merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi MBS dalam bidang proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP, guru, dan komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: implementasi MBS bidang proses belajar mengajar diawali dengan perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut. Penyusunan program dilakukan melalui suatu kegiatan rapat pada setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh personel sekolah. Bagi guru diwajibkan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa dan kondisi sekolah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, kemudian disupervisi oleh kepala sekolah sesuai dengan jadwal dengan menggunakan instrumen observasi pembelajaran. Hasil pelaksanaan supervisi kelas didokumentasikan dan disampaikan kepada guru baik secara individual maupun secara kelompok. Hasil evaluasi dijadikan sebagai tindak lanjut berupa mengadakan perbaikan apabila pelaksanaan belum mencapai secara maksimal dan menjadi program lanjutan pada tahun berikutnya.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Proses Belajar Mengajar dan Mutu Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena melalui pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang dan pendidikan diakui sebagai kekuatan yang dapat menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Pendidikan di sekolah merupakan suatu sistem sosial terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling

mempengaruhi. Sistem ini berasal dari lingkungan untuk melalui proses di sekolah sehingga menghasilkan output yang akan dikembalikan ke lingkungan.

Perkembangan pendidikan mempunyai sifat yang kompleksitas, dinamis dan kontekstual. Kompleksitas pendidikan merupakan suatu upaya pendidikan yang serius karena melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang akan membentuk diri seseorang secara keseluruhan untuk menjadi manusia seutuhnya. Dinamis pendidikan merupakan suatu proses yang bergerak dan berkembang secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman. Kontekstual pendidikan merupakan sebuah filosofi belajar yang menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman siswa.

Komponen utama sekolah adalah siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum serta fasilitas pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu jawaban dari pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan dan telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi, “pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Penerapan MBS diyakini sebagai suatu model implementasi kebijakan desentralisir pendidikan, yang merupakan suatu konsep inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan Mulyasa (2009:33) mengatakan bahwa: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. Hal ini disebabkan dalam konsep MBS, pengambilan keputusan diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yaitu sekolah, meskipun standar pelayanan minimumnya ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dalam mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan di sekolah.

Tujuan dilaksanakannya MBS adalah untuk peningkatan efisiensi, peningkatan mutu, peningkatan pemerataan pendidikan. Dengan adanya MBS diharapkan akan memberi peluang dan kesempatan kepada kepala sekolah, guru dan siswa untuk melakukan inovasi pendidikan. Dengan

adanya MBS maka ada beberapa keuntugan dalam pendidikan yaitu, kebijakan dan kewenangan sekolah mengarah langsung kepada siswa, orang tua dan guru, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, pembinaan peserta didik dapat dilakukan secara efektif, dapat mengajak semua pihak untuk memajukan dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan hal tentang dua sisi yang sangat penting yaitu proses dan hasil. Mutu dalam proses pendidikan melibatkan berbagai input seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana dan prasarana lembaga pendidikan, dukungan administrasi, berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang baik dan nyaman untuk belajar. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu.

Tanggung jawab sekolah dalam MBS bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan berbagai upaya dalam mencapai mutu sekolah. Namun dalam aspek pengelolaan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu program prioritas sekolah yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Desentralisasi pendidikan memberikan kebebasan, baik kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah dan *stakeholders* sekolah. Umiarso dan Imam mengemukakan bahwa: "Manajemen berbasis sekolah pada intinya memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus." Manajemen

berbasis sekolah adalah keseluruhan proses merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan dan mengendalikan seluruh pendukung atau penggunaan (*stakeholders*) sekolah dan sumberdaya sekolah untuk mencapai tujuan sekolah khususnya dan tujuan pendidikan umumnya.¹

Gagasan MBS perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya sekolah. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat diutamakan peran eksekutif sekolah. Berkaitan dengan masalah tersebut manajemen berbasis sekolah harus dapat menggerakkan sumber daya personil baik internal sekolah eksternal, sekolah atau orang-orang lain yang terkait dengan sekolah untuk dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Selain itu manajemen berbasis dapat melaksanakan fungsi manajemen dalam hal pengorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber dalam upaya mencapai tujuan sekolah.

Dalam melaksanakan MBS, sekolah harus memperhatikan 10 prinsip tentang MBS, yaitu: “Keterbukaan, kebersamaan, keberlanjutan, menyeluruh, pertanggungjawaban, demokratis, kemandirian, berorientasi mutu, pencapaian pelayanan minimal, dan pendidikan untuk semua.”² Selanjutnya, Mulyasa mengemukakan bahwa model MBS memiliki aspek kewenangan dalam MBS meliputi:

1. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa;
2. Melakukan pengelolaan sekolah. Bentuk pengelolaan sekolah menggambarkan pelaksanaan MBS
3. Membuat perencanaan, melaksanakan dan pertanggung jawaban
4. Pelaksanaan MBS tidak lepas dari akuntabilitas yang dapat dilihat dari perencanaan sekolah dan pencapaiannya
5. Menjamin dan mengusahakan sumber daya manusia dan dana.

¹ Umiarso dan Imam, *Manajemen Mutu Sekolah*. (Yogyakarta: IRCiSoD.2010), Hlm. 70

² Suparlan, dkk. *Pemberdayaan Komite Sekolah*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), Hlm. 18

6. Dalam MBS dipraktekkan apa yang disebut dengan fleksibilitas sumber-sumber yang mencakup dukungan untuk (a) pelajaran dan memimpin, (b) dukungan sekolah, dan (c) lingkungan sekolah.³

Manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat dan lingkungan sekitar.

Urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab sekolah dalam kerangka MBS menurut Rohiat meliputi: (1) proses belajar mengajar, (2) perencanaan dan evaluasi program sekolah, (3) pengelolaan kurikulum, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan siswa, (8) hubungan sekolah dan masyarakat, (9) pengelolaan iklim sekolah.⁴

Dalam proses belajar mengajar, cara-cara belajar siswa aktif seperti *active learning*, *cooperative learning* dan *quantum learning* perlu diterapkan. Sekolah diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya dan melakukan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Kurikulum sebagai rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, serta evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik.

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 37

⁴ Rohiat, *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*. Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm.65

dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

2. Mutu Pendidikan

Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Menurut Umiarso dan Imam bahwa: "Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu."⁵

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum dan ujian Nasional). Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*ouput*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

Pendidikan bermutu atau tidak dapat terlihat dari indikator-indikator mutu pendidikan. Menurut Sallis bahwa Indikator mutu pendidikan dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu "Sekolah sebagai penyedia jasa pendidikan (*service provider*) dan siswa sebagai pengguna jasa (*costumer*) yang di dalamnya ada orang tua, masyarakat dan *stakeholder*. Indikator mutu dari perspektif *service provider* adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang bermutu dilihat dari *output* lembaga pendidikan tersebut."⁶

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono mengemukakan bahwa: "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah secara

⁵ Umiarso dan Imam Gojali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), Hlm. 125

⁶ Sallis. Edward, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Jogyakarta: IRCiSoD, 2010), Hlm. 24

mendalam dan mengadung makna berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori".⁷ Penelitian ini dilakukan untuk memahami fenomena-fenomena secara alamiah atas keunikan, dinamika, dan hakikat holistik terkait implementasi MBS dalam bidang proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, teknik observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua MGMP, guru, dan komite sekolah sesuai dengan fokus masalah. Observasi dilakukan untuk mengecek kebenaran data yang diberikan melalui konfirmasi dan studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi manajemen berbasis sekolah bidang proses belajar mengajar pada SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar diawali dengan perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut. Penyusunan program dilakukan melalui suatu kegiatan rapat pada setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh personel sekolah. Kepala sekolah menyampaikan secara rinci tentang pelaksanaan pembelajaran. Setiap guru dapat memberikan masukan dan pertimbangan terhadap program yang ditawarkan, sampai pada akhirnya diambil keputusan yang dipilih untuk dijalankan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam perencanaan program pembelajaran disusun kegiatan dalam merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah. pembagian jadwal piket, pembina upacara, pelatihan dan kegiatan pembinaan Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) sekolah, roster pelajaran dan kelender pendidikan. Bagi guru diwajibkan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran.

Sebelum pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah memeriksa dan melakukan pembinaan kepada guru terkait silabus, program tahunan,

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 9

program semester, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kepala sekolah mengarahkan agar guru mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan keadaan siswa dan kondisi sekolah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Penyusunan rencana pembelajaran merupakan suatu bagian terpenting dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dikatakan penting, karena untuk guru RPP tersebut merupakan acuan atau skenario yang harus dilalui tahap demi tahap dalam memberikan materi kepada siswa. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, setiap guru wajib dan menjadi syarat mutlak untuk membuat RPP, sebelum proses penampilan di dalam kelas. Dalam penyusunan RPP ini, setiap guru harus berpedoman pada program pengajaran setiap bidang studi serta kalender akademik pada saat tahun pelajaran berlangsung.

Dalam melakukan perencanaan program, kepala sekolah dapat menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Terry dan Leslie bahwa: "Perencanaan merupakan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu."⁸

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dilakukan supervisi oleh kepala sekolah sesuai dengan jadwal yang dilakukan. Kepala sekolah menggunakan instrumen observasi pembelajaran yang telah disediakan. Kegiatan supervisi kelas dilakukan untuk melihat kesesuaian antara RPP dengan implementasi pembelajaran.

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri pribadi individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Tugas

⁸ Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 9

paling utama guru dalam pembelajaran adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Menurut Danim (2012:218) bahwa: “Kepala sekolah harus mampu mengorganisasikan staf dan membantu guru dalam memformulasikan program bagi peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dengan mengembangkan kemampuan profesional guru, mengembangkan supervisi, dan merangsang guru untuk berpartisipasi aktif di dalam usaha mencapai tujuan.”⁹

Hasil pelaksanaan supervisi kelas menjadi bahan evaluasi kepala sekolah terhadap guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Hasil evaluasi didokumentasikan dan disampaikan kepada guru baik secara individual maupun secara kelompok. Hasil evaluasi dijadikan sebagai tindak lanjut berupa mengadakan perbaikan apabila pelaksanaan belum mencapai secara maksimal dan menjadi program lanjutan pada tahun berikutnya.

Evaluasi pendidikan memberikan manfaat baik bagi siswa/peserta pendidikan, pengajar maupun manajemen. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah digapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana siswa mendapatkan nilai yang memuaskan maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar siswa dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan maka siswa akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar, namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru/pengajar. Dari sisi pendidik, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menetapkan upaya supaya meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Priansa evaluasi berfungsi sebagai: (1) Alat untuk mengetahui ketercapaian tujuan, (2) Umpan balik proses yang dilaksanakan, dan (3) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan”.¹⁰

Pendapat Priansa di atas menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi pada dasarnya dimaksudkan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan

⁹ Danim, Sudarwan. 2012. *Visi Baru Manajemen Sekolah (Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 218.

¹⁰ Priansa, Donni Juni. 2015. *Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 106.

terhadap hasil yang telah dicapai. Perbaikan usaha tanpa didahului oleh kegiatan evaluasi adalah tidak mungkin; sebab untuk mengadakan perbaikan terlebih dahulu harus diketahui apa yang harus diperbaiki, dan mengapa hal itu perlu diperbaiki. Kegiatan evaluasi yang tidak menghasilkan titik tolak untuk perbaikan adalah hampa dan tidak ada artinya sama sekali.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS bidang proses belajar mengajar pada SMA Negeri 1 Lubuk Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar diawali dengan perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut. Penyusunan program dilakukan melalui suatu kegiatan rapat pada setiap awal tahun ajaran dengan melibatkan seluruh personel sekolah. Bagi guru diwajibkan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa dan kondisi sekolah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, kemudian disupervisi oleh kepala sekolah sesuai dengan jadwal yang dilakukan dengan menggunakan instrumen observasi pembelajaran. Hasil pelaksanaan supervisi kelas didokumentasikan dan disampaikan kepada guru baik secara individual maupun secara kelompok. Hasil evaluasi dijadikan sebagai tindak lanjut berupa mengadakan perbaikan apabila pelaksanaan belum mencapai secara maksimal dan menjadi program lanjutan pada tahun berikutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Danim, Sudarwan. 2012. *Visi Baru Manajemen Sekolah (Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Priansa, Donni Juni. 2015. *Manajemen Peserta Didik dan Model Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sallis. Edward. 2010. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, dkk. 2006. *Pemberdayaan Komite Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Umiarso dan Imam Gojali. 2010. *Manajemen Mutu Sekolah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.